



Food Security Based on Population Factors in the Perspective of Public Governance: A Conceptual Study

Muhammad Deddy Syafrullah, Yuliansyah

Program Studi Agribisnis Pangan, Politeknik Negeri Sriwijaya
Palembang, Indonesia

Fadlurrahman

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Tidar
Magelang, Indonesia

Seiren Ikhtiara

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia

Email correstpondence : fadlurrahman@untidar.ac.id

Abstract

Purpose : This study aims to analyze the relationship between population factors and food security within the perspective of public governance through a conceptual approach.

Design/methodology/approach : This study employs a qualitative approach with a conceptual paper design. Data were collected through literature review from relevant academic sources, including international and national journal articles. The analysis was conducted using descriptive-qualitative techniques by synthesizing theoretical concepts to develop an integrative conceptual framework.

Findings : The findings indicate that population dynamics, such as population growth, density, urbanization, and demographic structure, significantly influence food demand, distribution, and consumption patterns. Public governance plays a mediating role in managing these dynamics through policy coordination, data-based decision-making, and adaptive governance mechanisms. The study proposes a conceptual model integrating population factors, public governance, and food security.

Practical Implication : The study highlights the importance of strengthening data-driven public governance by integrating population data into food policy planning. It also emphasizes cross-sectoral coordination to ensure more targeted and effective food security policies.

Originality/value : This study contributes to the literature by developing an integrative conceptual model that links population dynamics, public governance, and food security, offering a multidisciplinary perspective that is still limited in previous studies.

Keywords : Food Security, Population Dynamics, Public Governance, Policy Integration, Conceptual Model.

Paper type : *Conceptual Paper.*

Ketahanan Pangan Berbasis Faktor Kependudukan dalam Perspektif Tata Kelola Publik: Kajian Konseptual

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara faktor kependudukan dan ketahanan pangan dalam perspektif tata kelola publik melalui pendekatan konseptual.

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, baik jurnal nasional maupun internasional. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif melalui sintesis konsep dan temuan penelitian untuk membangun kerangka konseptual yang integratif.

Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kependudukan, seperti pertumbuhan penduduk, kepadatan, urbanisasi, dan struktur demografi, berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan, distribusi, dan pola konsumsi pangan. Tata kelola publik berperan sebagai variabel mediasi dalam mengelola dinamika tersebut melalui koordinasi kebijakan, penggunaan data dalam pengambilan keputusan, serta mekanisme kebijakan yang adaptif. Penelitian ini menghasilkan model konseptual yang mengintegrasikan faktor kependudukan, tata kelola publik, dan ketahanan pangan.

Implikasi Praktis : Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola publik berbasis data melalui integrasi data kependudukan dalam perencanaan kebijakan pangan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Originalitas/Nilai : Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengembangkan model konseptual integratif yang menghubungkan dinamika kependudukan, tata kelola publik, dan ketahanan pangan dalam satu kerangka analisis multidisiplin yang masih terbatas dalam kajian sebelumnya.

Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Dinamika Kependudukan, Tata Kelola Publik, Integrasi Kebijakan, Model Konseptual.

Jenis Penelitian : Artikel Konseptual.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi. Secara konseptual, ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga akses, pemanfaatan, dan stabilitas dalam jangka panjang (Godfray et al., 2010; Jones et al., 2013). Dalam konteks pembangunan, ketahanan pangan memiliki hubungan yang signifikan dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan nasional (Barrett, 2010; Wheeler & Von Braun, 2013).

Di Indonesia, tantangan ketahanan pangan semakin kompleks seiring dengan dinamika kependudukan yang terus berkembang. Pertumbuhan jumlah penduduk meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan pangan, sementara distribusi penduduk yang tidak merata menyebabkan ketimpangan akses pangan antar wilayah (Anríquez et al., 2013; Timmer, 2010). Selain itu, proses urbanisasi yang pesat juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat, termasuk meningkatnya konsumsi pangan olahan dan perubahan preferensi pangan yang berdampak pada sistem distribusi dan ketersediaan pangan (Popkin, 2017; Reardon & Timmer, 2012). Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor kependudukan memiliki peran penting dalam membentuk dinamika ketahanan pangan.

Lebih lanjut, ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari peran tata kelola publik dalam mengatur sistem pangan secara efektif. Dalam perspektif administrasi publik, tata kelola yang baik menekankan pentingnya koordinasi antar sektor, penggunaan data dalam pengambilan kebijakan, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Ansell & Gash, 2008; Pierre & Peters, 2020). Namun demikian, dalam praktiknya, kebijakan pangan sering kali belum sepenuhnya berbasis pada analisis faktor kependudukan secara komprehensif, sehingga kurang mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat di berbagai wilayah (Head, 2016; Howlett & Mukherjee, 2018).

Di sisi lain, hubungan antara faktor kependudukan dan ketahanan pangan menunjukkan kompleksitas yang memerlukan pendekatan yang lebih integratif. Karakteristik demografi seperti jumlah penduduk, kepadatan, dan urbanisasi tidak hanya mempengaruhi permintaan pangan, tetapi juga menentukan pola distribusi serta tingkat kerentanan terhadap krisis pangan (Fanzo, 2013; Godfray et al., 2010). Oleh karena itu, pendekatan ketahanan pangan yang hanya berfokus pada aspek produksi tidak lagi memadai dan perlu dikombinasikan dengan analisis kependudukan dalam kerangka kebijakan publik.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas ketahanan pangan, sebagian besar masih berfokus pada aspek produksi, distribusi, dan ekonomi pangan, baik dalam konteks global maupun nasional (Ariningsih & Rachman, 2008; Ericksen, 2008; Fan & Rao, 2008; Misselhorn et al., 2012; Suryana, 2014). Sejumlah studi juga menekankan pentingnya sistem pangan dan kebijakan pertanian dalam menjaga stabilitas pangan, namun masih cenderung melihat permasalahan secara sektoral (Ainistikmalia et al., 2022; Béné et al., 2019; Saliem & Ariani, 2002). Selain itu, dinamika urbanisasi dan perubahan pola konsumsi memang mulai diperhatikan, tetapi belum secara komprehensif mengintegrasikan faktor kependudukan dalam kerangka tata

kelola publik (Crush et al., 2011; Popkin, 2017). Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam literatur, di mana hubungan antara faktor kependudukan dan ketahanan pangan belum dianalisis secara integratif dalam perspektif governance, sehingga berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang adaptif dan tidak berbasis kebutuhan masyarakat (Cairney, 2016; Parkhurst, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara faktor kependudukan dan ketahanan pangan dalam perspektif tata kelola publik melalui pendekatan konseptual. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kerangka integratif, serta memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan pangan yang lebih adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika kependudukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian konseptual (*conceptual paper*), yang bertujuan untuk mengkaji hubungan antara faktor kependudukan dan ketahanan pangan dalam perspektif tata kelola publik. Pendekatan ini mengacu pada klasifikasi artikel konseptual yang dikemukakan oleh Jaakkola (2020) dan Gilson & Goldberg (2015), yang menekankan pada pengembangan konsep melalui sintesis literatur dan integrasi teori yang telah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik ketahanan pangan, kependudukan, dan administrasi publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan sumber-sumber pustaka yang relevan dan kredibel. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan, membandingkan, serta mensintesis berbagai konsep dan hasil penelitian untuk membangun kerangka pemikiran yang integratif (Creswell & Creswell, 2023; Snyder, 2019). Proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan model konseptual yang mampu menjelaskan keterkaitan antara faktor kependudukan, tata kelola publik, dan ketahanan pangan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan Pangan sebagai Sistem Multidimensional

Ketahanan pangan merupakan konsep yang bersifat multidimensional dan tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai ketersediaan pangan. Dalam perkembangan kajian akademik, ketahanan pangan mencakup berbagai dimensi utama, yaitu ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*), yang saling berkaitan dalam membentuk kondisi ketahanan pangan suatu wilayah (Jones et al., 2013; Pinstrup-Andersen, 2009). Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan pangan secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, pendekatan ketahanan pangan yang terlalu berfokus pada aspek produksi sering kali tidak mampu menjawab permasalahan kerawanan pangan secara menyeluruh. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan produksi pangan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan akses pangan masyarakat, terutama pada kelompok rentan (Barrett, 2010; Godfray et al., 2010). Oleh karena itu, pendekatan sistem pangan (food system approach) mulai dikembangkan untuk memahami keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi dalam satu kesatuan yang saling mempengaruhi (Ericksen, 2008; Ingram, 2011).

Lebih lanjut, ketahanan pangan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersifat dinamis. Modernisasi sistem pangan, termasuk berkembangnya rantai pasok modern dan meningkatnya konsumsi pangan olahan, turut mengubah struktur ketahanan pangan di berbagai wilayah (Popkin, 2017; Reardon & Timmer, 2012). Selain itu, konsep ketahanan pangan juga semakin berkembang dengan memasukkan aspek ketahanan sistem (resilience), yang menekankan kemampuan sistem pangan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai guncangan, seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan gangguan distribusi (Tendall et al., 2015; Wheeler & Von Braun, 2013).

Dalam konteks tersebut, pendekatan sistem menjadi penting untuk memahami ketahanan pangan secara lebih komprehensif. Ketahanan pangan tidak hanya merupakan hasil dari proses produksi dan distribusi, tetapi juga merupakan outcome dari interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan (Fanzo, 2013; Ingram, 2011). Dengan demikian, analisis ketahanan pangan perlu dilakukan secara integratif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, termasuk faktor kependudukan dan tata kelola publik sebagai bagian dari sistem yang lebih luas.

Peran Faktor Kependudukan dalam Ketahanan Pangan

Faktor kependudukan merupakan salah satu determinan utama dalam membentuk dinamika ketahanan pangan, terutama melalui pengaruhnya terhadap permintaan, distribusi, dan pola konsumsi pangan. Pertumbuhan jumlah penduduk secara langsung meningkatkan kebutuhan pangan, sehingga menimbulkan tekanan terhadap sistem produksi dan distribusi pangan, khususnya di negara berkembang (Godfray et al., 2010; Tilman et al., 2011). Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan lahan, air, dan sumber daya lainnya yang menjadi faktor penting dalam sistem pangan (Foley et al., 2011).

Tidak hanya jumlah penduduk, distribusi dan kepadatan penduduk juga memiliki peran signifikan dalam ketahanan pangan. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung menghadapi tekanan yang lebih besar terhadap akses pangan, terutama di kawasan perkotaan yang bergantung pada pasokan pangan dari wilayah lain (Bren d'Amour et al., 2017; Seto & Ramankutty, 2016). Urbanisasi yang pesat juga mengubah struktur permintaan pangan, di mana masyarakat perkotaan cenderung memiliki pola konsumsi yang berbeda dibandingkan masyarakat pedesaan, termasuk peningkatan konsumsi pangan olahan dan makanan siap saji (Popkin, 2017; Reardon & Timmer, 2012).

Selain itu, struktur demografi seperti komposisi umur dan tingkat ketergantungan juga mempengaruhi ketahanan pangan, terutama dalam konteks rumah tangga. Rumah tangga dengan jumlah anggota yang besar atau tingkat ketergantungan yang tinggi cenderung memiliki beban konsumsi yang lebih besar, sehingga lebih rentan terhadap kerawanan pangan (Headey & Ecker, 2013; Smith & Haddad, 2015). Di sisi lain, perubahan struktur demografi, seperti bonus demografi, juga dapat menjadi peluang dalam meningkatkan ketahanan pangan apabila diiringi dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Faktor kependudukan juga berinteraksi dengan aspek sosial ekonomi dalam menentukan akses terhadap pangan. Tingkat pendidikan, pendapatan, dan mobilitas penduduk berpengaruh terhadap kemampuan individu maupun rumah tangga dalam memperoleh pangan yang cukup dan berkualitas (Barrett, 2010; Jones et al., 2013). Oleh karena itu, ketahanan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan secara makro, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan secara adil dan berkelanjutan.

Maka dari itu, faktor kependudukan tidak hanya berperan sebagai variabel demografis semata, tetapi juga sebagai faktor yang membentuk dinamika sistem pangan secara keseluruhan. Kompleksitas hubungan ini menunjukkan bahwa analisis ketahanan pangan perlu mempertimbangkan berbagai aspek kependudukan secara integratif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam perumusan kebijakan pangan yang efektif.

Tata Kelola Publik dalam Sistem Pangan

Tata kelola publik memiliki peran strategis dalam mengatur sistem pangan agar mampu menjamin ketersediaan, distribusi, dan akses pangan secara berkelanjutan. Dalam perspektif administrasi publik, tata kelola tidak hanya berkaitan dengan peran pemerintah sebagai regulator, tetapi juga melibatkan berbagai aktor, termasuk sektor swasta dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Ansell & Gash, 2008; Iriani et al., 2025; Pierre & Peters, 2020). Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi, koordinasi lintas sektor, serta integrasi kebijakan dalam mengelola sistem pangan yang kompleks.

Dalam konteks ketahanan pangan, tata kelola publik berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan antara ketersediaan pangan di tingkat makro dengan akses pangan di tingkat mikro. Kebijakan publik berperan dalam mengatur distribusi pangan, stabilisasi harga, serta perlindungan terhadap kelompok rentan melalui berbagai program intervensi (Barrett, 2010; Timmer, 2010). Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan data serta informasi yang akurat.

Salah satu tantangan utama dalam tata kelola pangan adalah keterbatasan integrasi data, khususnya data kependudukan, dalam proses perumusan kebijakan. Banyak kebijakan pangan yang masih bersifat umum (*one-size-fits-all*) dan belum mempertimbangkan secara spesifik karakteristik demografis wilayah, seperti kepadatan penduduk, tingkat urbanisasi, dan struktur sosial ekonomi masyarakat (Head, 2016; Howlett & Mukherjee, 2018). Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang

dihasilkan kurang adaptif terhadap kebutuhan lokal dan berpotensi tidak efektif dalam mengatasi kerawanan pangan.

Selain itu, kompleksitas sistem pangan menuntut adanya pendekatan tata kelola yang lebih adaptif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dalam konteks ini, penggunaan data dan analisis yang komprehensif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik (Cairney, 2016; Parkhurst, 2016). Pendekatan berbasis data memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan.

Dengan demikian, tata kelola publik memiliki peran sentral sebagai mediator dalam sistem ketahanan pangan. Tidak hanya mengatur distribusi dan akses pangan, tata kelola juga menentukan sejauh mana faktor kependudukan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pangan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola publik yang berbasis data dan adaptif terhadap dinamika kependudukan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Model Konseptual Integrasi Kependudukan dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan pembahasan pada sub-bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa ketahanan pangan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor kependudukan, sistem pangan, dan tata kelola publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka konseptual yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu model analisis yang sistematis. Model konseptual ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana faktor kependudukan mempengaruhi ketahanan pangan melalui peran mediasi tata kelola publik.

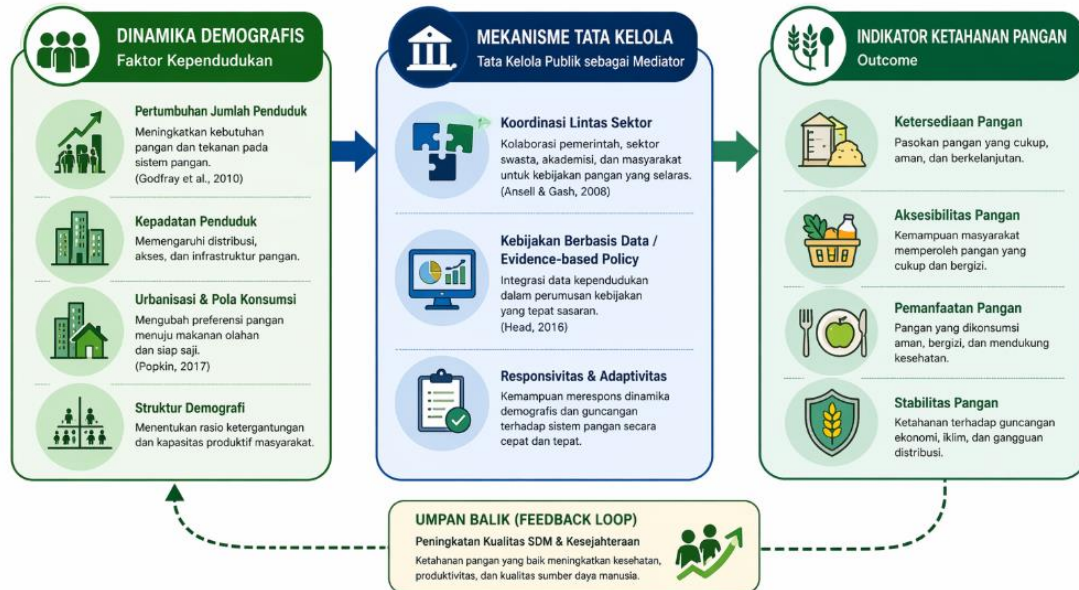
Dalam model ini, faktor kependudukan diposisikan sebagai variabel awal yang mempengaruhi dinamika kebutuhan dan pola konsumsi pangan. Pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan, serta urbanisasi akan meningkatkan permintaan pangan sekaligus mengubah pola distribusi dan konsumsi masyarakat (Godfray et al., 2010; Seto & Ramankutty, 2016). Perubahan ini menciptakan tekanan terhadap sistem pangan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun aksesibilitas.

Selanjutnya, tata kelola publik berperan sebagai variabel mediasi yang menentukan bagaimana tekanan tersebut dikelola melalui kebijakan dan program pemerintah. Dalam konteks ini, tata kelola publik mencakup perencanaan kebijakan, koordinasi antar sektor, serta pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan (Ansell & Gash, 2008; Head, 2016). Efektivitas tata kelola publik akan menentukan sejauh mana sistem pangan mampu merespons dinamika kependudukan secara adaptif dan tepat sasaran.

Output dari interaksi tersebut adalah kondisi ketahanan pangan yang tercermin dalam tingkat ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan di masyarakat. Ketahanan pangan yang baik akan tercapai apabila tata kelola publik mampu mengintegrasikan faktor kependudukan ke dalam kebijakan pangan secara efektif. Sebaliknya, ketidakterpaduan antara data kependudukan dan kebijakan pangan berpotensi menyebabkan ketimpangan akses pangan serta meningkatnya kerawanan pangan di kelompok tertentu.

Secara konseptual, hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Model Konseptual Ketahanan Pangan Berbasis Kependudukan



Sumber : Hasil olahan peneliti (2026)

Model konseptual pada gambar 1 menggambarkan hubungan integratif antara dinamika kependudukan, tata kelola publik, dan ketahanan pangan dalam suatu kerangka sistemik. Faktor kependudukan ditempatkan sebagai input utama yang mencakup pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan, urbanisasi, dan struktur demografi. Variabel-variabel ini berpengaruh langsung terhadap peningkatan kebutuhan pangan serta perubahan pola konsumsi masyarakat, sehingga menciptakan tekanan terhadap sistem produksi dan distribusi pangan.

Tata kelola publik berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan dinamika kependudukan dengan kondisi ketahanan pangan. Melalui mekanisme seperti koordinasi lintas sektor, kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*), serta responsivitas kebijakan, pemerintah dapat mengelola tekanan yang ditimbulkan oleh perubahan demografis. Efektivitas tata kelola ini menentukan sejauh mana sistem pangan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, ketahanan pangan sebagai outcome diukur melalui empat indikator utama, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Model ini juga menunjukkan adanya hubungan umpan balik, di mana ketahanan pangan yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, yang selanjutnya mempengaruhi kembali dinamika kependudukan. Dengan demikian, model ini menegaskan pentingnya integrasi antara faktor kependudukan dan tata kelola publik dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Model ini menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh kemampuan tata kelola publik dalam mengelola dinamika kependudukan secara efektif. Selain itu, model ini juga menunjukkan bahwa tata kelola publik memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kondisi demografis dan hasil akhir berupa ketahanan pangan.

Dengan demikian, kontribusi utama dari model konseptual ini adalah memberikan kerangka analisis yang integratif dalam memahami ketahanan pangan, khususnya dengan menempatkan faktor kependudukan sebagai variabel kunci yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam kajian kebijakan publik. Model ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pangan yang lebih adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya ditentukan oleh aspek produksi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika kependudukan dan kualitas tata kelola publik. Faktor kependudukan seperti pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan, urbanisasi, dan struktur demografi memiliki peran penting dalam membentuk kebutuhan, distribusi, dan pola konsumsi pangan. Oleh karena itu, ketahanan pangan perlu dipahami dalam kerangka sistem yang integratif dan tidak parsial.

Selain itu, tata kelola publik berperan sebagai faktor kunci yang menjembatani hubungan antara dinamika kependudukan dan ketahanan pangan. Efektivitas kebijakan pangan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan data kependudukan ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendekatan kebijakan yang berbasis data dan adaptif terhadap karakteristik demografis menjadi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Penelitian ini masih bersifat konseptual sehingga memiliki keterbatasan dalam pengujian empiris terhadap model yang diusulkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk menguji model konseptual ini secara empiris melalui pendekatan kuantitatif maupun mixed methods, guna mengukur hubungan antara faktor kependudukan, tata kelola publik, dan ketahanan pangan secara lebih terukur. Selain itu, studi lanjutan juga dapat mengembangkan analisis berbasis wilayah atau studi kasus untuk memahami variasi implementasi kebijakan pangan pada konteks lokal yang berbeda. Penggunaan data longitudinal serta integrasi data kependudukan dalam skala yang lebih luas juga menjadi peluang bagi penelitian berikutnya dalam memperkuat pendekatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam sistem ketahanan pangan.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola publik dalam sistem pangan melalui pendekatan berbasis data (*evidence-based policy*). Pemerintah perlu mengintegrasikan data kependudukan dalam perencanaan kebijakan pangan, khususnya dalam menentukan sasaran program, distribusi

bantuan, serta pengendalian harga pangan. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor antara instansi yang menangani kependudukan, pangan, dan kesejahteraan sosial agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Dari sisi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik dan ketahanan pangan melalui penyusunan model konseptual yang mengintegrasikan faktor kependudukan, tata kelola publik, dan ketahanan pangan dalam satu kerangka analisis. Model ini memperluas pendekatan sebelumnya yang cenderung parsial, dengan menekankan pentingnya peran tata kelola publik sebagai variabel mediasi dalam sistem pangan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menguji model konseptual ini secara empiris, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun studi kasus, guna memperkuat validitas dan relevansinya dalam konteks kebijakan publik.

REFERENCES

- Ainistikmalia, N., Kharisma, B., & Budiono, B. (2022). Analisis kemiskinan multidimensi dan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 5.
- Anríquez, G., Daidone, S., & Mane, E. (2013). Rising food prices and undernourishment: A cross-country inquiry. *Food Policy*, 38, 190–202.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ariningsih, E., & Rachman, H. P. . (2008). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(3), 239–255.
- Barrett, C. B. (2010). Measuring food insecurity. *Science*, 327(5967), 825–828.
- Béné, C., Oosterveer, P., Lamotte, L., Brouwer, I. D., De Haan, S., Prager, S. D., Talsma, E. F., & Khoury, C. K. (2019). When food systems meet sustainability—Current narratives and implications for actions. *World Development*, 113, 116–130.
- Bren d'Amour, C., Reitsma, F., Baiocchi, G., Barthel, S., Güneralp, B., Erb, K.-H., Haberl, H., Creutzig, F., & Seto, K. C. (2017). Future urban land expansion and implications for global croplands. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(34), 8939–8944.
- Cairney, P. (2016). *The politics of evidence-based policy making*. Springer.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In SAGE Publications, Inc.
- Crush, J., Frayne, B., & McLachlan, M. (2011). *Rapid urbanization and the nutrition transition in Southern Africa*.
- Ericksen, P. J. (2008). Conceptualizing food systems for global environmental change research. *Global Environmental Change*, 18(1), 234–245.
- Fan, S., & Rao, N. (2008). Public expenditures, growth, and poverty. *Public Expenditures, Growth and Poverty in Developing Countries: Lessons from Developing Countries*, 56–108.
- Fanzo, J. C. (2013). *The nutrition challenge in sub-Saharan Africa*.

- Foley, J. A., Ramankutty, N., Brauman, K. A., Cassidy, E. S., Gerber, J. S., Johnston, M., Mueller, N. D., O'Connell, C., Ray, D. K., & West, P. C. (2011). Solutions for a cultivated planet. *Nature*, 478(7369), 337–342.
- Gilson, L. L., & Goldberg, C. B. (2015). Editors' comment: so, what is a conceptual paper? In *Group & Organization Management* (Vol. 40, Issue 2, pp. 127–130). SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J. F., Pretty, J., Robinson, S., Thomas, S. M., & Toulmin, C. (2010). Food security: the challenge of feeding 9 billion people. *Science*, 327(5967), 812–818.
- Head, B. W. (2016). Toward more “evidence-informed” policy making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484.
- Headey, D., & Ecker, O. (2013). Rethinking the measurement of food security: from first principles to best practice. *Food Security*, 5(3), 327–343.
- Howlett, M., & Mukherjee, I. (2018). Policy design and non-design – A continuum of formulation modalities. In *Routledge handbook of policy design* (pp. 305–315). Routledge.
- Ingram, J. (2011). A food systems approach to researching food security and its interactions with global environmental change. *Food Security*, 3(4), 417–431.
- Iriani, A., Prabujaya, S. P., Zubaidah, S., & Endasari, E. (2025). Pendekatan Thinking Across dalam Dynamic Governance: Strategi Efektif untuk Mewujudkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), 20–41. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.4687>
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: four approaches. *AMS Review*, 10(1), 18–26.
- Jones, A. D., Ngure, F. M., Pelto, G., & Young, S. L. (2013). What are we assessing when we measure food security? A compendium and review of current metrics. *Advances in Nutrition*, 4(5), 481–505.
- Misselhorn, A., Aggarwal, P., Ericksen, P., Gregory, P., Horn-Phathanothai, L., Ingram, J., & Wiebe, K. (2012). A vision for attaining food security. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 4(1), 7–17.
- Parkhurst, J. (2016). *The politics of evidence: from evidence-based policy to the good governance of evidence*. Routledge.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, politics and the state*. Bloomsbury Publishing.
- Pinstrup-Andersen, P. (2009). Food security: definition and measurement. *Food Security*, 1(1), 5–7.
- Popkin, B. M. (2017). Relationship between shifts in food system dynamics and acceleration of the global nutrition transition. *Nutrition Reviews*, 75(2), 73–82.
- Reardon, T., & Timmer, C. P. (2012). The economics of the food system revolution. *Annu. Rev. Resour. Econ.*, 4(1), 225–264.
- Saliem, H. P., & Ariani, M. (2002). Ketahanan pangan, konsep, pengukuran dan strategi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(1), 12–24.
- Seto, K. C., & Ramankutty, N. (2016). Hidden linkages between urbanization and food systems. *Science*, 352(6288), 943–945.

- Smith, L. C., & Haddad, L. (2015). Reducing child undernutrition: past drivers and priorities for the post-MDG era. *World Development*, 68, 180–204.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Suryana, A. (2014). Menuju ketahanan pangan indonesia berkelanjutan 2025: tantangan dan penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 123–135.
- Tendall, D. M., Joerin, J., Kopainsky, B., Edwards, P., Shreck, A., Le, Q. B., Kruetli, P., Grant, M., & Six, J. (2015). Food system resilience: Defining the concept. *Global Food Security*, 6, 17–23.
- Tilman, D., Balzer, C., Hill, J., & Befort, B. L. (2011). Global food demand and the sustainable intensification of agriculture. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(50), 20260–20264.
- Timmer, C. P. (2010). Reflections on food crises past. *Food Policy*, 35(1), 1–11.
- Wheeler, T., & Von Braun, J. (2013). Climate change impacts on global food security. *Science*, 341(6145), 508–513.